

**DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK
DI MASA PANDEMI *COVID-19***

Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nur Mustafidah

Nim : 31402000242

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

**DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK
DI MASA PANDEMI *COVID-19***

Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nur Mustafidah

Nim : 31402000242

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

SKRIPSI

**DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK
DI MASA PANDEMI *COVID-19*
Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia (BEI)**

Disusun Oleh:

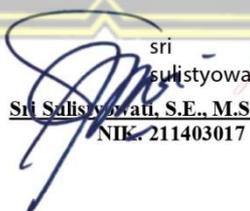
Nur Mustafidah

NIM : 31402000242

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 10 Agustus 2023

Pembimbing,


sri 2023.08.10
sulistyowati 21:05:50
+07'00'

Sri Sulistyowati, S.E., M.Si., CIISA
NIK. 211403017

**DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK
DI MASA PANDEMI COVID-19
Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

**Disusun Oleh:
Nur Mustafidah
NIM: 31402000242**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing


21/08/2023
Sri Sulistyawati, S.E., M.Si., CHSA
NIK. 211403017

Penguji I


Dr. Sri Anik, S.E., M.Si
NIK. 210493033

Penguji II


Dedi Rusdi, S.E., M.Si./ Akt., CA.
NIK. 211496006

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 18 Agustus 2023

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Mustafidah

NIM : 31402000242

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam Skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2023



Nur Musangan

31402000242

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insyirah, 6-8).

“Tiada yang bisa menolak takdir Allah, kecuali doa.”

(HR. Tirmidzi, Hakim, Ahmad, dan Ibnu Majah).

Sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ♥ Kedua Orang tua saya tercinta, Ibu Munijah dan almarhum bapak Subari atas do'a cinta dan kasih sayangmu. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Bapak 😊.
- ♥ Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai berada di titik ini 😊.
- ♥ Murobbi ruhina Habib Ali Zainal Abidin Assegaf berkat sholawat hidup jadi berkah dan nikmat.
- ♥ Teman-teman dan sahabat yang selalu memberi support dalam menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus bukanlah kejahatan dan aib. *God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot faith, but it's worth thr wait.*

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara sebagai penyumbang utama pendapatan suatu negara, lesunya perekonomian akibat pandemi Covid-19 selain berimbas pada penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak belum optimal mengindikasikan adanya tindakan penghindaran pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji variabel *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Metode pengambilan data sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 26. Berdasarkan hasil penelitian ini *financial constraint* dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kompensasi direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Kepemilikan Saham Direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *penghindaran pajak, financial constraint, manajemen laba, kompensasi direksi, kepemilikan saham direksi.*

ABSTRACT

Taxes are people's mandatory contributions to the state as the main contributor to a country's income, especially the economy due to the Covid-19 pandemic in addition to affecting state revenues. Suboptimal state tax revenue indicates tax avoidance. The purpose of this study is to examine the variables of financial constraints, earning management, directors' compensation and directors' share ownership against tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. This study used purposive sampling based on predetermined criteria. The analysis technique used is multiple linear regression using SPSS 26. Based on the results of this study, financial constraints and earning management have no effect on tax avoidance. Board of directors' compensation has a positive effect on tax avoidance and Board of Directors' Share Ownership has an active effect on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, financial constraints, earning management, director's compensation, directors' shareholding.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Illahi Robbi bahwasanya atas berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah sebagai syarat untuk melengkapi tugas dalam rangka menempuh derajat Sarjana S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Skripsi yang berjudul **“Determinan Penghindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).”**

Penyusunan usulan penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak lain baik secara material maupun spiritual, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
3. Sri Sulistyowati, S.E., M.SI., CIISA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Seluruh Staff karyawan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang hingga saat ini.

5. Kedua orang tua yaitu Ibu saya tercinta yang selalu memberikan doa dan semangat, serta alm. Bapak saya sehingga usulan penelitian untuk Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan motivasi sehingga usulan penelitian ini terselesaikan dengan baik.

Semoga usulan penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pembaca umum.



Semarang, 2023

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Halaman Pengesahan

Error! Bookmark not defined.

Halaman Pernyataan Keaslian	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PUSTAKA	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Agensi	10
2.1.2 Pajak	12
2.1.2.1 Pengertian Pajak	12
2.1.2.2 Fungsi Pajak	14
2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.2.4 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak	18
2.1.3 Penghindaran Pajak	19

2.1.4 Financial Constraints.....	24
2.1.5 Manajemen Laba.....	25
2.1.6 Kompensasi Direksi	27
2.1.7 Kepemilikan Saham Direksi.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1 Pengaruh Financial Constraints terhadap Tax Avoidance	33
2.3.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
2.3.3 Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.4 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	37
3.3 Sumber dan Jenis Data	38
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.5 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.5.1 Variabel Dependen.....	39
3.5.2 Variabel Independen	40
3.6 Teknik Analisis	45
3.6.1 Statistik Deskriptif	45
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	48

3.6.4 <i>Goodness of Fit</i>	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	51
4.2 Teknik Analisis	54
4.2.1 Statistik Deskriptif	54
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	56
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.4 Uji Hipotesis	65
4.4.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t).....	65
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.4.3 Uji F (Uji Pengaruh Simultan).....	68
4.5 Pembahasan.....	69
4.5.1 Pengaruh Financial Constraint terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
4.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Tax Avoidance</i>	70
4.5.3 Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	72
4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	72
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan.....	75
5.3 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 - 2021	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional & Variabel.....	44
Tabel 4. 1 Tahap Seleksi Sampel Penelitian	51
Tabel 4. 2 Daftar Nama Perusahaan	52
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas (Uji Kormogorov-Smirnov).....	58
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	61
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)	66
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Detreminasi (R^2).....	67
Tabel 4. 11 Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas (Uji Grafik Normal Plot).....	57
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan

Lampiran 2 : Tabulasi Data

Lampiran 3 : Data Hasil Pengolahan Data *SPSS Ver 26*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara sebagai penyumbang utama pendapatan suatu negara sebagai penopang perekonomian dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan infrastruktur untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Pajak juga merupakan salah satu instrumen negara untuk mengurangi kesenjangan. Dalam perancangan APBN ada tiga komponen salah satunya adalah pendapatan negara yang diperoleh dari pungutan pajak. Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan yang mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara.

Definisi pajak didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, penerimaan terbesar negara berasal dari sektor pajak. Tabel 1.1 ini merupakan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 – 2021 yang menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak lebih besar daripada sektor non pajak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017 - 2021
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penrimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak
2017	1.343.529,80	311.216,30
2018	1.518.789,80	409.320,20
2019	1.546.141,90	408.994,30
2020	1.285.136,32	343.814,21
2021	1.375.832,70	357.210,10

Sumber: www.bps.go.id (diakses 19 September 2021)

Pandemi *Covid-19* mendorong pemerintah bekerja lebih giat agar keadaan ekonomi tetap stabil meskipun mobilitas dibatasi oleh pemerintah dengan adanya kebijakan PSBB hingga *lockdown*. Penerimaan pajak di masa pandemi ikut tererosok Penerimaan pajak pada tahun 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (*Coronavirus Sisease-2019/Covid-19*) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles. Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka penerimaan pendapatan pajak mencapai 89,3% dari target penerimaan negara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, penerimaam ditahun 2020 menunjukkan adanya penurunan 19,7%. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2020 silam selalu menurun setiap bulannya (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif>). Pandemi *Covid-19* yang terjadi telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja serta pembiayaan negara.

Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah satunya dengan memberikan kebijakan pajak. Lesunya perekonomian akibat pandemi *Covid-19* selain berimbas pada penerimaan negara, juga berimbas pada keuangan perusahaan dimana suatu perusahaan juga akan melakukan efisiensi biaya salah satunya beban pajak (Husin et al., 2020). Perbedaan kepentingan dan sudut pandang pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak negara yang besar, tentu saja bertolak belakang dengan wajib pajak yang menginginkan pembayaran beban pajak perusahaannya seminimal mungkin. *Self-Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang rentan akan penyelewengan. Praktik agresivitas pajak merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan pajak dengan cara memperkecil beban pajak yang akan disetorkan baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi manajemen pajak dengan melakukan upaya penghindaran pajak secara legal dan tidak melanggar hukum dengan memanfaatkan celah hukum atau *loop hole* untuk mengurangi beban pajak dari yang seharusnya disetor ke kas negara (Wang et al., 2019) dalam (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara legal, perusahaan tidak melakukan tujuan peraturan perpajakan dan tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan dengan jalan memanfaatkan setiap celah kelemahan yang ada pada undang-undang. Dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan dapat menghemat beban pajak yang seharusnya disetor ke kas negara dan perusahaan akan memperoleh laba yang lebih besar sebagai dampak dari penghematan beban pajak

(Hariseno & Pujiono, 2021). Saat melakukan tindakan penghindaran pajak memungkinkan munculnya kerugian, antara lain sanksi berupa denda dari kantor pajak dikemudian hari dan turunnya harga saham saham jika manajemen melakukan tindakan tersebut dan diketahui oleh para pemegang saham (Husin et al., 2020).

Kondisi ekonomi di Indonesia yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh *Covid-19* akan tetapi juga akibat kondisi ketidakpastian global yang kian memanas, yang dapat berdampak pada penurunan profit yang dihasilkan perusahaan sebagai sumber dana operasional, dapat menyebabkan perusahaan mengalami *financial constraints* yang akhirnya menunda untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha (Utami & Irawan, 2022). Perusahaan yang sedang mengalami *financial constraints* akan menghadapi kesulitan berupa keterbatasan kas sehingga sulit berinvestasi. Perusahaan akan berusaha menghasilkan *operating cash flow* yang tinggi untuk membiayai biaya internal perusahaan melakukan penghindaran pajak (Chen & Lai, 2012) dalam (Utami & Irawan, 2022). Dalam kondisi seperti ini perusahaan akan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan manajemen laba.

Manajemen laba adalah salah satu cara bagaimana memanipulasi laporan keuangan sesuai tingkatan laba yang diinginkan (*income decreasing*) sehingga pendapatan asli yang tinggi tidak diketahui, jika laba yang dihasilkan sedikit maka pajak terutang pun menjadi sedikit (Prawirodiharjo et al., 2020). Menurut (Husin et al., 2020) Perusahaan akan melakukan manajemen laba dan pajak, suatu manajer akan melakukan manipulasi data untuk memperoleh laba yang tinggi agar

memperoleh timbal balik yang tinggi. Laba merupakan parameter yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam suatu periode yang diperlukan pengguna internal dan eksternal dalam pembuatan keputusan, pembagian insentif dan bonus kepada manajer (Kusuma & Firmansyah, 2018).

Kompensasi Direksi merupakan tambahan yang diberikan perusahaan kepada direksi atas hasil kinerjanya baik berupa kas maupun non kas (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Pemberian kompensasi kepada dewan direksi berperan untuk memotivasi agar lebih giat mencapai kinerjanya dalam meminimalisasi biaya pajak terutang perusahaan (Husin et al., 2020). Jika jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan direksi besar maka akan minimalisir kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak, karena kompensasi ini akan memberikan pengaruh terhadap moral dan disiplin para direksi (Hanifah Hanim dan Fatahurrizak, 2018). Jika direksi dapat mengurangi beban pajak maka laba perusahaan pun akan meningkat.

Selain kompensasi direksi faktor yang menentukan keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan saham di suatu perusahaan. Direksi secara kolektif bertanggung jawab dan bertugas mengelola perusahaan. Kepemilikan saham direksi dapat memacu kinerja direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan pemegang saham yang dapat menjaga nilai dan kelangsungan hidup perusahaan (Husin et al., 2020). Dengan memiliki saham, direksi merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung dalam melakukan penghindaran pajak (Putri & Indriani, 2020). Keputusan direksi untuk melakukan penghindaran pajak

akan berimplikasi pada kenaikan *cash flow* karena beban pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Pada penelitian sebelumnya terdapat adanya masalah keagenan yang menciptakan konflik antara manajer dan pemegang saham. Dengan adanya pandemi *Covid-19* yang terjadi hingga saat ini mengakibatkan kendala keuangan (*financial constraint*) hampir di seluruh sektor perekonomian. Himbauan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan himbauan *physical distancing* lainnya membuat roda perekonomian nyaris berhenti. Dampak langsung yang harus dihadapi sebagian besar perusahaan dan individu adalah kesulitan *cashflow*, yang disebabkan oleh merosotnya nilai pendapatan secara drastis karena proses bisnis tidak berjalan normal seperti biasanya, namun berbagai biaya rutin tetap harus dikeluarkan yang memunculkan kendala keuangan (*financial constraint*) bagi beberapa sektor industri. Dalam aspek manajemen bisnis, *cashflow* merupakan komponen penting yang sangat dibutuhkan untuk tetap eksis dan melakukan berbagai kegiatan operasional perusahaan. Permasalahan *cashflow* bisa menjadi awal permasalahan pada banyak hal, perusahaan akan sulit bertahan sehingga akan melakukan berbagai langkah pragmatis yang terpaksa harus ditempuh diantaranya perusahaan akan meminimalkan pengeluaran beban operasional perusahaan seperti biaya karyawan (gaji dan THR), beban-beban overhead, beban pajak dan beban lainnya dengan segala variasinya. Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang mengacu pada penelitian sebelumnya, dengan menambahkan variabel kendala keuangan

(*financial constraints*) selama pandemi *Covid-19* sebagai faktor yang diduga menentukan perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Perusahaan yang sedang mengalami kendala keuangan (*financial constraint*) karena menurunnya nilai pendapatan dimasa pandemi *Covid-19* apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK DI MASA PANDEMI *COVID-19* - STUDI PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Pandemi *Covid-19* yang terjadi telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan mengakibatkan kendala keuangan (*financial constraint*) hampir di seluruh sektor perekonomian. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan akibat munculnya pandemi *Covid-19* sehingga mendorong perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya-biaya yang dikeluarkan diantaranya beban pajak yang akan disetor. Kondisi luar biasa selama masa pandemi *Covid-19* seperti ini apakah penghindaran pajak masih dilakukan perusahaan seperti pada kondisi normalnya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kendala Keuangan (*financial constraints*) perusahaan pada masa pandemi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah Manajemen Laba suatu perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah Kompensasi Direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?
4. Apakah Kepemilikan Saham Direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh Kendala Keuangan (*financial constrains*), Manajemen Laba, Kompensasi Direksi dan Kepemilikan Saham Direksi terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh Kendala Keuangan (*financial constrains*) terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
2. Menguji dan membuktikan pengaruh Manajemen Laba terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).
3. Menguji dan membuktikan pengaruh Kompensasi Direksi terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

4. Menguji dan membuktikan pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan, referensi dan pengetahuan tentang pengaruh Kendala Keuangan (*financial constraints*), Manajemen Laba, Kompensasi Direksi, Kepemilikan Saham Direksi terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat mengetahui dan mengawasi aktivitas perusahaan dalam praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

- b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan dan referensi bagi investor maupun Pemegang saham tentang perusahaan yang mengalami Kendala Keuangan (*financial constraints*) pada masa pandemi yang melakukan praktik penghindaran pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen Meckling (1976) dalam (Sochib, 2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu pihak (prinsipal) memberikan pihak lain (agen) otoritas pengambilan keputusan untuk melakukan beberapa layanan atas namanya. Teori agensi ini menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham, dimana manajer profesional mengambil peran yang bertindak atas nama pemegang saham perusahaan. Masalah keagenan timbul karena adanya perbedaan antara pengambilan keputusan oleh manajer profesional dan bantalan resiko residual oleh pemegang saham yang disebut dengan *agency problem* (konflik keagenan). Ada dua jenis masalah keagenan dapat terjadi, yang pertama masalah keagenan tipe I sebagai akibat dari kontrak yang tidak lengkap antara manajer dan pemegang saham dan masalah keagenan tipe II adalah konflik terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Timothy 2010 dalam (Gunawan, 2017) menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang menimbulkan konflik. Manajer profesional akan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan melalui tindakan agresif terhadap pajak, namun dengan konsekuensi biaya yang dikeluarkan akan meningkat seperti biaya *non tax* untuk mengefisiensi beban pajak perusahaan yang dikeluarkan untuk memanipulasi transaksi. Hal ini mencerminkan

bahwa tindakan memaksimalkan laba tidak sepenuhnya menguntungkan bagi pemegang saham.

Brennan (1995) dalam (Pratama, 2020) berpendapat bahwa masalah keagenan tidak dapat dikendalikan tanpa biaya karena ketidakmungkinan melakukan kontrak dengan sempurna untuk tindakan agen yang keputusannya mempengaruhi kesejahteraannya sendiri dan kesejahteraan prinsipal. Biaya keagenan ini merupakan kerugian nilai bagi pemegang saham yang timbul dari biaya meminimalkan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Biaya Pemantauan (*Monitoring Costs*) merupakan pengeluaran yang dibayarkan oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku agen.
- b. Biaya Perikatan (*Bonding Costs*) merupakan biaya yang dikeluarkan akibat dari pemantauan yang harus dikeluarkan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin agar manajer mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan tidak merugikan.
- c. Biaya Residual (*Residual Costs*) merupakan kerugian yang timbul dari konflik kepentingan sebagai dampak dari kepentingan manajer dan pemegang saham yang tidak selaras meskipun *monitoring* dan *bonding* telah dilaksanakan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, hubungan agensi akan muncul ketika agen diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan dan pengambilan keputusan oleh prinsipal. Berdasarkan teori agensi, prinsipal

menginginkan perusahaan melakukan penghindaran pajak demi mencapai laba yang maksimal. Sedangkan agen atau direksi akan berusaha menghindari resiko dari kebijakan tersebut dengan melakukan manajemen laba untuk memperoleh laba maksimal demi mengamankan reputasi mereka. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan laba yang maksimal, namun adanya kemungkinan agen bertindak tidak sesuai kepentingan prinsipal maka timbulah benturan kepentingan. Prinsipal akan berusaha memberikan kompensasi kepada Dewan Direksi untuk mendorong Direksi agar melakukan tindakan penghindaran pajak, karena pemberian kompensasi akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Besarnya jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan direksi akan berpengaruh terhadap semakin tingginya usaha para dewan direksi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu *ajeg* yang berarti pungutan teratur waktu tertentu. *Pa-ajeg* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar

presentase tertentu yang dilakukan oleh raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan yang berkembang pada saat itu (Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi).

Pajak merupakan pungutan dari wajib pajak sebagai bentuk partisipasi baik perseorangan maupun badan kepada negara, untuk mencapai kesejahteraan negara melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Santoso, 2014) dalam (Alifianti H. P. & Chariri, 2017). Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak dapat dirumuskan dengan memahami unsur-unsur yang terdapat di dalam makna pajak. Beberapa unsur yang dapat dipahami mengenai pajak dijelaskan dibawah ini:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran yang dimaksud adalah uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dalam hal ini menyangkut manfaat utama asas pajak. Manfaat utama pajak adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara. Dengan demikian pajak menjadi tulang punggung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, hukum dan ketahanan negara. Fungsi pajak secara umum dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair merupakan fungsi utama pajak atau sebagai fungsi fiskal. Dimaknai bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi ini merupakan fungsi yang secara historis muncul pertama kali dalam suatu kekuasaan atau negara yang menghandalkan penerimaan pajak sejak zaman sebelum masehi. Fungsi utama pemerintah dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum membutuhkan dana dalam pembiayaannya. Pelayanan masyarakat sebagai tugas rutin pemerintah maupun pembangunan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai pemegang hak pengelolaan negara dalam melakukan fungsinya tersebut, pemerintah menggunakan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai penerimaan negara yang terbesar.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak berfungsi sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di masyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. Kebijakan pemerintah melalui peraturan pemungutan pajak dapat mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, maupun kekuatan likuiditas di pasar.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya

menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat. Pasar akan berkembang dengan baik dan menjadikan perubahan sosial perekonomian masyarakat juga.

2.1.2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, dikenal adanya stelsel pajak. Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Menurut (Mardiasmo, 2019) Pemungutan pajak suatu negara dilakukan berdasar 3 stelsel:

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Sistem Nyata menetapkan jumlah pajak berdasarkan kondisi nyata atau riil. Dasar pengenaan pajak adalah pada objeknya atau penghasilan yang sebenarnya sesuai dengan Laporan Keuangan Tahunan atau total gaji dalam setahun dimana pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yaitu setelah diketahui total penghasilan yang sesungguhnya. Selain itu sistem ini juga ditetapkan untuk jenis pajak yang transaksinya terjadi pada saat itu. Stelsel Nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pemungutan pajak, dalam stelsel nyata mempunyai kelebihan dimana pajak yang dikenakan lebih realistis. Namun kelemahannya pemungutan pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Dalam Stelsel Anggapan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan sesuai aturan undang-undang. Stelsel ini mempunyai kelebihan yaitu pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun, dan kelemahannya dapat menimbulkan perbedaan jumlah pajak yang telah

dibayarkan dengan jumlah pajak yang terutang seharusnya di akhir tahun. Pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, Total penghasilan suatu tahun adalah 10 Milyar maka total penghasilan tahun setelahnya dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak terutang ditetapkan berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya untuk pembayaran pajak tahun berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan campuran dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Perhitungan besarnya pajak awal tahun didasarkan pada suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun dihitung disesuaikan berdasarkan keadaan sebenarnya. Jika besarnya pajak yang sesungguhnya melebihi pajak awal tahun menurut anggapan yang telah dibayar pada tahun berjalan, maka harus membayar kekurangan pajak dan sebaliknya jika kelebihan dapat diajukan pengembalian atau restitusi.

Pengenaan pajak berdasarkan atas asas yang diberikan kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Menurut (Mardiasmo, 2019) asas yang digunakan atas pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Domisili

Berdasarkan asas domisili Negara berhak memungut pajak atas penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.

b. Asas Sumber

Pemungutan pajak atas asas ini bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Negara berhak mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Pajak akan dikenakan di Indonesia bagi Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Luar Negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia.

c. Asas kebangsaan

Berdasarkan asas kebangsaan maka pemungutan pajak akan didasarkan pada status kebangsaan dari suatu negara. Dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.2.4 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Membayar pajak tidak bisa lepas dari perilaku Wajib Pajak. Permasalahan berakar manakala Warga Negara membayar pajak pada Negara namun tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dikeluarkan secara sukarela. Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tertinggi tentunya akan membayar pajak lebih tinggi sesuai dengan level lapisan tarif pajak yang sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. Sehingga untuk mencapai kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak butuh kesukarelaan yang tinggi dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk ketidakrelaan atau ketidakpuasan atas kebijakan yang diberlakukan. Usaha untuk tidak membayar pajak ataupun memanipulasi data pendapatanpun dilakukan untuk

meminimalisasikan jumlah pajak yang terutang. Perlawanan seperti inilah yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak yang tentunya berimbas pada penerimaan Negara. Adapun perlawanan dari Wajib Pajak dapat berbentuk perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif.

Menurut (Rahayu, 2020), Perlawanan pasif dari Wajib Pajak ditimbulkan oleh struktur perekonomian negara, intelektualitas penduduk, moral masyarakat dan sistem perpajakan negara. Sedangkan perlawanan aktif merupakan upaya yang secara aktif dilakukan langsung oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Artinya perlawanan perpajakan ini dilakukan untuk menghindari, mengurangi, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan sebagai usaha dari Wajib Pajak kepada fiskus dan Negara. Menurut (Mardiasmo, 2019) Bentuk perlawanan pajak secara aktif ada dua yaitu *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dan *Tax Evasion* (penggelapan pajak) .

2.1.3 Penghindaran Pajak

Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak adalah suatu tindakan yang bukan melanggar hukum pajak, namun akan berpengaruh langsung terhadap pengurangan potensi Penerimaan Pajak. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang seharusnya menjadi beban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material Wajib Pajak. Tindakan seperti ini dapat memberikan dampak sentimen negatif atas ketidakadilan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang terutang.

Penghindaran Pajak adalah tindakan yang diupayakan manajemen untuk menghindari pengeluaran biaya pajak yang lebih besar, akan tetapi tidak keluar dari lingkup peraturan undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak ini dilakukan melalui tindakan atau metode dengan memanfaatkan celah atau *loop hole* kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan secara legal atau tidak melanggar hukum agar nilai pajak yang terutang lebih kecil (Hariseno & Pujiono, 2021). Dengan mengimplementasikan Penghindaran Pajak, maka Wajib Pajak besar dapat menghindari *Compliance Cost* yang tinggi. Manajemen Pajak perusahaan akan menetapkan skema transaksi yang dirancang sistematis untuk mengurangi Beban Pajak dengan jalan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tarif Pajak Penghasilan dan Ketentuan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan pos tertentu merupakan potensi besar untuk dapat menghemat Beban Pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hal tindakan yang dapat dibenarkan, dengan memanfaatkan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar. Tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memberikan *benefit* langsung maupun tidak langsung bagi Wajib Pajak dalam meminimalisasi *Compliance Cost*. Berkurangnya pajak yang dibayarkan dinilai sebagai bentuk kinerja bagi manajemen yang sesuai dengan kepentingan pemilik saham yaitu untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Kegiatan Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor finansial maupun non finansial. Adapun

faktor-faktor finansial yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Perusahaan.

Informasi kinerja keuangan digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi perusahaan, mengukur capaian keberhasilan perusahaan, penilaian kontribusi setiap bagian dalam perusahaan dan sebagai dasar penentuan keputusan bagi Top Manajemen. Efisiensi dan optimalitas kinerja keuangan dapat memberikan pengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*.

2. Intensitas Aktiva.

Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan, makin besar investasi perusahaan pada kepemilikan aset tetap memberikan tanggungan beban depresiasi semakin besar. Perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam aset tetapnya akan membayar pajak lebih rendah karena laba kotor perusahaan akan tereliminasi dengan pembebanan depresiasi.

3. Ukuran Perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari total nilai aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Semakin besar nilai ukuran perusahaan, semakin mampu untuk mengatur perpajakan dalam melakukan *tax saving* dengan Penghindaran Pajak.

4. Kompensasi Kerugian.

Perusahaan yang merugi tidak dibebani pajak pada periode rugi, dimana kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pajak terutang pada periode berikutnya dan akan dikompensasikan dengan batasan waktu tertentu (5 tahun).

5. Kompensasi bagi eksekutif.

Kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dapat berupa bonus sebagai bentuk apresiasi perusahaan dalam membentuk kontrak dengan manajer dalam menyelaraskan kepentingan antara perusahaan dengan kepentingan manajer. Pemberian kompensasi ini diakui sebagai komponen penghasilan karyawan yang dapat mengurangi laba operasi perusahaan. Pengenaan pajak dialihkan kepada kewajiban manajer melalui pemotongan PPh, dimana tarif yang dikenakan pada penghasilan level tertentu lebih kecil dibanding tarif perusahaan.

6. *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk perusahaan dalam memelihara hubungan baik dengan stakeholder dengan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada lingkungan luas secara etis. Umumnya perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi cenderung untuk melakukan tindakan Penghindaran Pajak.

7. Kepemilikan saham bagi eksekutif.

Skema transaksi atas kepemilikan saham bagi eksekutif berupa pembagian deviden akan mempengaruhi pada pajak penghasilan yang terutang. Pajak Penghasilan atas pembagian deviden dikenakan lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan pajak korporasi sebelum dikurangi pembagian deviden.

8. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*).

Kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan dapat mengakibatkan meningkatnya resiko kebangkrutan dan dapat meningkatkan

potensi perusahaan untuk melakukan praktik Penghindaran Pajak. Meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) perusahaan yang mengalami krisis secara general, maka manajer akan mengambil resiko untuk mengembalikan perusahaan melalui penghindaran pajak.

Sedangkan faktor-faktor non finansial yang dapat mempengaruhi untuk melakukan praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah:

1. Corporate Governance.

Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Governance* yang baik akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan Penghindaran Pajak pada koridor yang tepat. *Corporate Governance* terdiri atas kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen dan komite audit. Dewan Direksi merupakan peranan sentral dalam *corporate governance*, semakin besar proporsi Dewan Direksi maka semakin tinggi pula kompetensi dalam pencapaian *corporate governance* yang baik. Dewan Direksi dapat memberikan pengaruh pada praktik penghindaran pajak.

2. Karakteristik Eksekutif.

Pengambilan keputusan pada level tertinggi (*tone at top*) untuk mengatur pajak dalam aktivitas *Tax Avoidance* melibatkan pimpinan perusahaan yang memiliki karakter tertentu. Umumnya karakter eksekutif yang dimiliki pemimpin perusahaan adalah *Risk Taker* dan *Risk Averse*. *Risk Taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan beresiko tinggi. Sifat *Risk Taker* bertujuan untuk memperoleh *Cash Flow* yang tinggi melalui aktivitas

tax avoidance dengan memperbesar *tax saving*. Sedangkan *Risk Averse* lebih mengutamakan keamanan dibanding memperoleh keuntungan besar tetapi menimbulkan resiko. Karakter eksekutif tipe *Risk Averse* umumnya memiliki usia lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan.

3. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan pelanggaran maupun kesalahan yang dapat terjadi saat Laporan Keuangan diaudit oleh Auditor. Auditor yang memiliki kualitas baik mampu menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan pilihan atas tindakan-tindakan penghindaran pajaknya.

2.1.4 Financial Constraints

Financial Constraints merupakan kondisi dimana suatu perusahaan mengalami problem dalam hal keterbatasan atas kas yang dimiliki oleh perusahaan (Utami & Irawan, 2022). Menurut Dyreng, Hanlon dan Maydew (2010) dalam (Silvera et al., 2022) mendemonstrasikan bahwa suatu perusahaan yang mengalami kendala keuangan akan mengurangi aktivitas asing mereka. Shen dan Lin (2015) dalam (Silvera et al., 2022) Bagi perusahaan yang mengalami kendala keuangan namun memiliki koneksi politik akan mengurangi kendala keuangan mereka.

Kesulitan mendapatkan sumber dana eksternal dibanding dengan sumber dana internal mengakibatkan perusahaan mengalami kondisi keterbatasan keuangan (*financial constraints*). Keterbatasan keuangan perusahaan bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal seperti perkreditan makro yang tidak kondusif, resesi ekonomi

dan kebijakan kredit yang tidak didukung oleh pihak bank sehingga mempersulit memperoleh pembiayaan dari sumber eksternal. Semakin besar resiko korporat, semakin sulit mendapatkan dana eksternal karena pada prinsipnya investor menghindari resiko dan resiko korporat merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi *financial constraints* (Simanullang & Parasetya, 2022). Perusahaan yang sedang mengalami *financial constraints* melaporkan pajaknya 3%-8% lebih rendah dibandingkan perusahaan tanpa *financial constraints* (Chen & Lai, 2012).

2.1.5 Manajemen Laba

Laporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban manajer atas sumber daya pemilik. Laba adalah salah satu parameter penting untuk mengukur kinerja manajemen. Dalam menyajikan informasi laporan keuangan, manajer menyetakan para pemegang saham mengenai informasi kinerja ekonomi perusahaan dengan melakukan manajemen laba (*earnings management*). Scott (2009) mendefinisikan *earning management* sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.*” Atau dengan kata lain *earning management* adalah kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer untuk mencapai beberapa tujuan tertentu (Manossoh, 2016). Secara khusus cara pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) *Opportunistic Earnings Management*, pemahaman atas perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak uang dan *political cost*.
- b) *Efficient Earnings Management*, pemahaman berdasarkan perspektif *efficient contracting*.

Manajemen laba memberikan suatu fleksibilitas kepada para manajer untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga demi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dalam melindungi diri mereka dan perusahaan.

Pengertian manajemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam (Sochib, 2016) adalah “*Earning management occurs when managers uses judgment in financial reporting and in structuring to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contactual outcomes taht depend on the reported accounting numbers.*” Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan maksud memanipulasi kinerja laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan adalah media komunikasi untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Perbedaan atau asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunis untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanipulasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Fisher dan Rosenwig (1994) dalam (Manossoh, 2016), Manajemen laba adalah tindakan manajer yang dengan sengaja menaikkan

(menurunkan) laba periode berjalan tanpa menghasilkan peningkatan atau penurunan yang berkaitan dengan profitabilitas jangka panjang.

2.1.6 Kompensasi Direksi

Menurut (Siti Mujanah, 2019) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan dan jasa yang diberikan pada perusahaan. Kompensasi finansial atau non finansial diberikan berdasar kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Kompensasi merupakan imbal balik perusahaan kepada anggotanya sebagai bentuk kepuasan atas capaian yang diraih.

Kompensasi Direksi merupakan pemberian penghargaan kepada dewan direksi sebagai hak tambahan atas capaian tertentu baik berupa kas maupun non kas (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Kompensasi ini diberikan atas kinerja bagus yang dicapai, para direksi akan memperoleh kompensasi baik berupa bonus ataupun insentif yang tinggi jika laba yang dicapai perusahaan juga tinggi. Bonus diberikan atas dasar pencapaian kinerja dalam suatu periode, sedangkan gaji merupakan suatu pembayaran teratur dan berkesinambungan (Hanifah Hanim dan Fatahurrazak, 2018).

Ashari 2017 dalam (Husin et al., 2020) Pemberian Kompensasi kepada Direksi mempunyai tujuan agar kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*prinsipal*) dapat sejalan. Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada direksi ketika mencapai target tertentu sesuai kontrak yang dibuat diantara

keduanya ((Husin et al., 2020). Tercapainya target suatu perusahaan dinilai dari kinerja perusahaan yang terproyeksi dalam informasi keuangan. Dewan direksi adalah badan pembuat keputusan terpenting dalam sebuah perusahaan, bertanggungjawab untuk menyetujui keputusan strategis dan keuangan utama seperti merger, akuisisi, perubahan struktur modal.

2.1.7 Kepemilikan Saham Direksi

Menurut Henawati 2018 dalam (Husin et al., 2020), Kepemilikan Saham Direksi merupakan bagian kepemilikan saham yang disertakan dalam penanaman modal perusahaan untuk ikut andil dalam mempengaruhi dan memegang kontrol atas keputusan yang akan diambil, yang diyakini dapat mengurangi perbedaan kepentingan antara manajemen dan *shareholder*. Adanya kepemilikan saham oleh dewan direksi dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang lebih ketat.

Kepemilikan Saham Direksi dalam suatu perusahaan akan memacu para direksi untuk lebih giat lagi dan memotivasi untuk mencapai kinerja seoptimal mungkin, karena para direksi mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama didalam perusahaan tersebut (Harahap 2017 dalam (Pratiwi & Venusita, 2020). Hal ini dapat dikatakan bahwa selain sebagai manajer perusahaan, direksi juga sekaligus sebagai bagian pemilik dari perusahaan.

Adanya kepemilikan saham direksi dapat diartikan pula sebagai pemegang saham yang aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan yang berasal dari pihak manajemen. Masalah keagenan yang terjadi antara kepentingan antara agen (manajemen) dengan *shareholder* (prinsipal) menjadi kecil dengan adanya

kepemilikan saham oleh direksi (Jensen & Meckling, 1976). Dengan adanya saham yang dimiliki oleh direksi dapat meredam konflik agensi yang dapat mengurangi *cost agency* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam tabel 2.1 dapat dilihat hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
Hanifah Hanim, Fatahurrazak (2018)	Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016	Dependen: • Agresivitas Pajak Independen: • Dewan Komisaris Independen • Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	Effective Tax Rate (ETR)	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak • Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak • Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak
Muhammad Satrio Prawirodiharjo,	Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas dan Leverage	Dependen: • Agresivitas Pajak Independen:	Regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen laba secara parsial tidak berpengaruh terhadap

<p>Elly Suryani, S.E., M.Si., AK., CA., CPA., Kurnia S.A.B., M.M (2020)</p>	<p>Terhadap Agresivitas Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Laba • Profitabilitas • Leverage 		<p>nilai agresivitas pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai agresivitas pajak • Leverage secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai agresivitas pajak
<p>Ng Husin, Rosna Agustina, Anna Sofia Atichasari, dan Chintya Mega Pratiwi (2020)</p>	<p>Peran Manajemen Laba, Kompensasi Direksi, dan Kepemilikan Saham Direksi Terhadap Agresivitas Pajak pada Industri Manufaktur di Indonesia.</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agresivitas Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Laba • Kompensasi Direksi • Kepemilikan Saham Direksi 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. • Variabel kompensasi direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. • Variabel kepemilikan saham direksi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
<p>Richa Omega Winarno Putri , Etty</p>	<p>Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Independen:</p>	<p>Analisis regresi berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif &

Indriani (2020)	Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Saham Eksekutif • Kompensasi Eksekutif • Preferensi Risiko Eksekutif 	(multiple regression model)	<p>tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh negatif & tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. • Preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
Prestasila Esa, Hariseno Pujiono (2021)	Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktik Manajemen Laba 	Discretionary accruals dan Effective Tax Rate	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen laba mempunyai dampak bagi penghindaran pajak
Richo Mukti Ardiyanto, Andri Marfiana (2021)	Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi pada Penghindaran	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keahlian Keuangan • Kompensasi Direksi • Profitabilitas • Pertumbuhan Perusahaan 	GAAP ETR	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian keuangan direksi tidak berpengaruh pada penghindaran pajak • Kompensasi direksi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak

	Pajak Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusi 		<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. • Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak • Kepemilikan institusi berpengaruh negatif signifikan pada penghindaran pajak.
Dica Lady Silvera, Achmad Hizazi, M. Syurya Hidayat, Sri Rahayu (2022)	Financial constraints and corporate governance as moderating variables for the determinants of tax avoidance	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Tax Avoidance Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Financial constraints • Corporate Governance 	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate governance and financial constraints can moderate the impact of tax avoidance-related factors
Melina Fajrin Utami, Ferry Irawan (2022)	Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial	Dependen: <ul style="list-style-type: none"> • Penghindaran Pajak Independen: <ul style="list-style-type: none"> • Thin Capitalization • Transfer Pricing 	GAAP ETR	<ul style="list-style-type: none"> • Thin capitalization, transfer pricing aggressiveness dan financial constraints • merupakan faktor

	Constraints sebagai Variabel Moderasi.	Aggressiveness • Financial constraints sebagai variabel moderasi		pendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak
--	--	---	--	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Financial Constraints terhadap Tax Avoidance

Financial Constraints merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan berupa keterbatasan kas. Perusahaan yang mengalami kondisi *Financial Constraints* akan berusaha meningkatkan sumber pendanaan internal berupa penghematan pengeluaran kas diantaranya dengan pengurangan pajak terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan. *Financial Constraints* dapat memoderasi dampak dari faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak (Silvera et al., 2022). Oleh karena itu perusahaan yang sedang mengalami *financial constraints* akan menjaga *operating cash flow* sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Semakin tinggi kondisi *financial constraints* perusahaan semakin meningkat kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Utami & Irawan, 2022). Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Financial Constraints* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance

Manajemen laba merupakan upaya manajer untuk merekayasa informasi-informasi dalam laporan keuangan guna mengelabui para *stakeholder* dalam

menilai kinerja perusahaan. Manajer akan melakukan manajemen laba dengan memanipulasi laporan keuangan agar mendapatkan laba sesuai yang diinginkan, jika laba yang dihasilkan sedikit (*income decreasing*) maka beban pajak yang dibayarkan akan semakin kecil (Prawirodiharjo et al., 2020). Laba merupakan indikator penilaian kinerja manajemen, perusahaan akan menerapkan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Semakin besarnya tindakan *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan, berpengaruh terhadap besarnya perusahaan tersebut terindikasi melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Kompensasi Direksi merupakan pemberian insentif kepada Direksi atas kinerja yang dicapai, jika laba perusahaan yang dihasilkan tinggi maka tinggi pula kompensasi yang akan diterima (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Jika direksi mampu mengurangi beban pajak maka laba perusahaan akan meningkat. Semakin besar pemberian kompensasi kepada dewan direksi, maka semakin minim kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak begitu sebaliknya (Husin et al., 2020). Kompensasi yang diterima oleh Dewan Direksi akan memberikan pengaruh moral dan perilaku disiplin (Hanifah Hanim dan Fatahurrazak, 2018). Kompensasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi biaya bukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompensasi Direksi berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

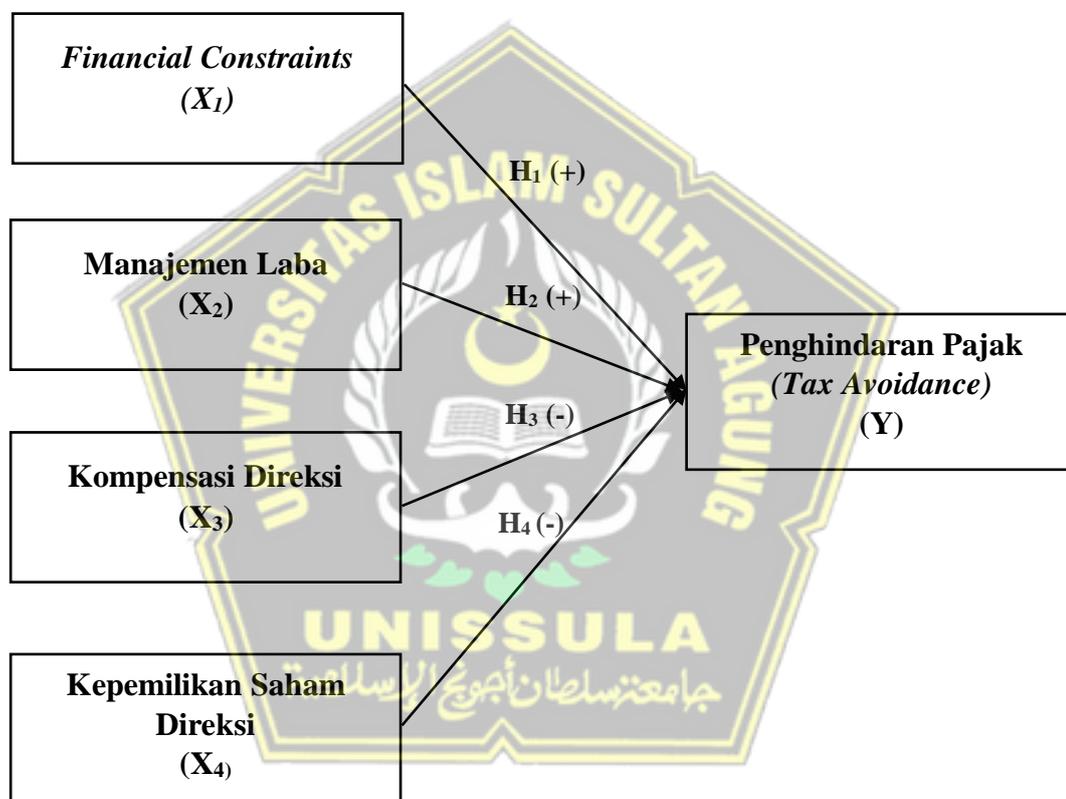
2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Saham Direksi mempunyai dampak pada sikap manajemen saat pengambilan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak (Husin et al., 2020). Direksi merupakan bagian dari bagian penting perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab mengelola perusahaan secara kolegal. Kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Putri & Indriani, 2020). Kepemilikan saham oleh dewan direksi dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak. Konflik agensi menjelaskan bahwa para Dewan Direksi akan mengutamakan kepentingannya dan mengesampingkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini akan menjadi berbeda ketika para Dewan Direksi mempunyai sebagian saham dalam suatu perusahaan, maka mereka akan berfikir dan lebih teliti dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak dikemudian hari. Kondisi seperti inilah yang mendorong untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan saham direksi dalam suatu perusahaan, maka para Dewan Direksi akan lebih giat dalam mencapai kinerjanya dan kepatuhannya termasuk kepatuhan dalam hal perpajakan yaitu menghindari dan mencegah aktivitas penghindaran pajak dalam perusahaan (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepemilikan Saham Direksi berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggambarkan bagaimana hubungan antara *Financial Constraints*, Manajemen Laba, Kompensasi Direksi dan Kepemilikan Saham Direksi terhadap Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang digambarkan dalam model berikut ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori (*explanatory research*) adalah penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis, dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan dengan model yang sistematis, teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam (Hardani, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh data-data yang diperoleh dari orang lain tidak berasal dari sumber langsung.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2021). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Sampel merupakan bagian atau sebagian atau sebagian kecil atau subjek dari sejumlah karakteristik sebuah populasi yang digunakan untuk penelitian (Syahza & Riau, 2021). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling (sampel dengan tujuan) yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan beberapa kriteria berikut ini:

1. Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan dan disajikan dengan mata uang rupiah tahun 2019-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan auditan secara lengkap tahun 2019-2021.
4. Laporan Keuangan Perusahaan manufaktur yang mempunyai data lengkap mengenai *Discretionary accruals* dan *Effective Tax Rate*.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis-jenis data dan sumbernya dapat dibagi berdasarkan sifatnya, sumbernya, cara memperolehnya, dan waktu pengumpulannya (Sujarweni, 2021). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu dioleh lagi. Data sekunder yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi diperoleh dengan cara membaca, mempelajari data-data laporan keuangan perusahaan manufaktur sesuai kriteria sampel dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *website* resmi perusahaan. Dalam studi dokumentasi teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan penelusuran dokumen-dokumen secara tidak langsung pada subjek penelitian. Sedangkan metode studi pustaka data diperoleh dengan cara memahami dan menelaah dari beberapa sumber diantaranya jurnal penelitian terdahulu, buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini menguraikan definisi dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan cara pengukurannya. Adapun variabel dependen (terikat) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*), sedangkan variabel independen atau variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Manajemen laba, Kompensasi Direksi, Kepemilikan Saham Direksi dan *Financial Constraint* sebagai variabel tambahan dari penelitian yang terdahulu.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran Pajak

(*Tax Avoidance*) merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh laba lebih dengan cara mengurangi atau meniadakan beban pajak yang seharusnya terutang atau dibayarkan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Dalam penelitian ini *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan peneliti untuk mengukur bagaimana proksi utama penghindaran pajak. Penggunaan proksi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dyrenge et al., 2017). ETR dihitung dari Beban Pajak Penghasilan dibagi dengan Pendapatan Sebelum Pajak dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Jadi, semakin besar nilai ETR nya maka semakin kecil tingkat penghindaran pajak perusahaan.

3.5.2 Variabel Independen

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya atau sebagai penyebab timbulnya perubahan variabel terikat (dependen). Adapun variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Financial Constraints*

Financial Constraints terjadi karena adanya kendala kredit, yaitu kondisi dimana perusahaan tidak mampu untuk melakukan pinjaman ke pihak eksternal, kesulitan menerbitkan ekuitas, serta kondisi likuiditas asetnya sulit sehingga pendanaan investasi menjadi terhambat (Benjamin, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini salah satu nya adalah *Financial Constraints* yang akan diukur

menggunakan indeks Whited & Wu (Indeks WW) karena dinilai mampu memprediksi kendala keuangan eksternal yang dapat mempengaruhi investasi (Utami & Irawan, 2022). Indeks WW dapat dihitung dengan cara berikut:

$$FC_{it} = -0,091 \times \left(\frac{Cash\ Flow}{TA} \right) - 0,062 \times (1\ if\ dv > 0,0\ if\ dv = 0) + 0,021 \times \left(\frac{LTD}{TA} \right) - 0,044 \times \ln TA - 0,035 \times SG$$

Keterangan:

FC = *Financial Constraints*

TA = *Total Assets*

Dv = *Devidend Paid*

LTD = *Total Long Term Debt*

SG = $(Sales_t - Sales_{t-1}) / Sales_{t-1}$

2. Manajemen Laba

Pada penelitian ini manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accruals* (DA). Penggunaan *discretionary accruals* dihitung menggunakan *Modified Jones Modes* sebagai proksi untuk manajemen laba, dan telah banyak dipakai untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan manajemen laba karena model ini dinilai paling baik dibandingkan model lainnya (Husin et al., 2020). Berikut adalah tahapan perhitungan untuk memperoleh nilai *discretionary accruals* (DA):

- a) Menghitung Total Akrual (TA) menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*) dengan rumus sebagai berikut:

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_t$$

- b) Mencari nilai koefisien dari regresi Total Akrual dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = a_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

- c) Menentukan nilai nondiskresioner (NDA) dengan rumus sebagai berikut:

$$NDA_{it} = a_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + e$$

- d) Dari perhitungan diatas, nilai *disscretionary accruals* (DA) dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut:

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode t

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFO_t = Arus kas aktivitas operasi perusahaan i pada periode t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir periode t-1

PPE_{it} = Aktiva Tetap perusahaan i pada akhir periode t

$\alpha_{1,2,3}$ = Koefisien

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

NDA_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

3. Kompensasi Direksi

Penelitian kali ini variabel kompensasi direksi diukur mengikuti penelitian (Putri & Indriani, 2020), yaitu dengan menggunakan total kompensasi yang diterima oleh para Dewan direksi dalam kurun waktu satu tahun. Kompensasi Direksi dapat berupa kas maupun non-kas seperti saham sebagai hak tambahan yang diberikan oleh perusahaan (Ardiyanto & Marfiana, 2021). Data penerimaan kompensasi oleh para Dewan Direksi dapat dilihat dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdapat pada bagian catatan atas laporan keuangan. Adapun pengukuran variabel Kompensasi Direksi diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Kompensasi Direksi

$$= \frac{\text{Total Kompensasi yang diterima Direksi selama setahun}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

4. Kepemilikan Saham Direksi

Selain variabel kompensasi direksi dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan Kepemilikan Saham Direksi sebagai variabel independen. Kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil keputusan yang dibuat oleh Direktur Pajak dan Konsultan Pajak (Putri & Indriani, 2020). Struktur kepemilikan suatu perusahaan akan berpengaruh pada keputusan kebijakan yang dibuat oleh para Direksi yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal pada perusahaan yang dikelolanya (Husin et al., 2020). Pada penelitian ini menggunakan persentase sebagai indikator pengukuran kepemilikan saham yang dimiliki oleh Dewan direksi seperti penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh (Husin et al., 2020) dan (Putri & Indriani, 2020).

Kepemilikan Saham Direksi diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Saham Direksi} = \frac{\% \text{ Jumlah Saham Direksi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Tabel 3.1

Definisi Operasional & Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Sumber
1.	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax Avoidance</i> merupakan upaya untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar, namun tidak keluar dari lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan.	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Ardiyanto & Marfiana, 2021)
2.	<i>Financial Constraints</i>	<i>Financial Constraints</i> merupakan kondisi dimana suatu perusahaan mengalami problem dalam hal keterbatasan atas kas yang dimiliki perusahaan.	$FC_{it} = -0,091 \times \left(\frac{\text{Cash Flow}}{TA} \right) - 0,062 \times (1 \text{ if } dv > 0,0 \text{ if } dv = 0) + 0,021 \times \left(\frac{LTD}{TA} \right) - 0,044 \times \ln TA - 0,035 \times SG$	(Utami & Irawan, 2022)
3.	Manajemen Laba	Manajemen laba merupakan upaya manajer merekayasa informasi-informasi dalam laporan keuangan guna mengelabui para stakeholder dalam menilai kinerja perusahaan.	$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$	(Husin et al., 2020)
4.	Kompensasi Direksi	Kompensasi Direksi merupakan pemberian insentif	$\text{Kompensasi Direksi} = \frac{\text{Kompensasi yang Diterima setahun}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Putri & Indriani, 2020)

		kepada Direksi atas kinerja yang dicapai.		
5.	Kepemilikan Saham Direksi	Kepemilikan perusahaan dimana pemilik perusahaan juga sebagai pengelola manajemen.	$\text{Kepemilikan Saham Direksi} = \frac{\% \text{ Jumlah Saham Direksi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$	(Husin et al., 2020)

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data digunakan untuk pengambilan keputusan dari apa yang sudah diteliti dengan suatu cara untuk mengolah sebuah data agar menghasilkan suatu informasi. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendeskripsikan data menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menjawab rumusan masalah. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda.

3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi agar mudah dipahami dan diinterpretasikan (Sujarweni, 2021). Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian (Prawirodiharjo et al., 2020).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian bertujuan untuk memastikan model regresi yang diperoleh telah memenuhi asumsi dasar analisis yang dilakukan dengan uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang dipergunakan haruslah bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang artinya pengambilan melalui uji F atau uji t tidak boleh

bias. Untuk melaksanakan operasi linier diperlukan tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, yaitu: tidak terjadi korelasi, tidak terjadi multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Putri & Indriani, 2020). Model Regresi yang baik yaitu memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05) maka data telah berdistribusi dengan normal begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari α (0,05) maka variabel tidak berdistribusi normal (Utami & Irawan, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan analisis *One Sample Kormogorov Smirnov* untuk menguji normalitas data. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas dari model yang ada. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *tolerance value* dan *variance inflation*

factor (VIF). Batas dari *tolerance value* adalah lebih besar dari 0,1 atau 10% dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 jika memenuhi keduanya maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Dalam model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi, apabila terdapat korelasi maka terdapat masalah autokorelasi (Putri & Indriani, 2020). Mendeteksi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Tujuan uji heteroskedastisitas adalah mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam model regresi dari residual satu pengamatan ke residual pengamatan lainnya. Dikatakan heteroskedastisitas jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda (Putri & Indriani, 2020). Apabila hasil uji diatas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya jika levelnya dibawah nilai signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan linear dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi ini digunakan untuk menguji variabel independen, yaitu : *financial constraints*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen serta menunjukkan arah hubungan kedua variabel tersebut. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \beta X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
X_1	= <i>Financial Constraint</i>
X_2	= Manajemen Laba
X_3	= Kompensasi Direksi
X_4	= Kepemilikan Saham Direksi
e	= Error

3.6.4 Goodness of Fit

1. Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji pengaruh parsial atau uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel

terikat (Ghozali, 2018). Uji t dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan nilai statistik t dengan t tabel. Jika nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a ditolak

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R^2 untuk mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi yang mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) terbatas begitu pula sebaliknya.

3. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji Pengaruh Simultan atau uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang ada mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (dependen). Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig), jika nilai sig

dibawah 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kriteria uji F sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independennya secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependennya.
- b. Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independennya secara simultan mempengaruhi variabel dependennya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur selama tahun 2019-2021. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* agar sampel yang akan diambil dalam penelitian merupakan representasi dari populasi yang ada serta sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit sesuai kriteria sampel yang telah ditentukan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diperoleh dari *web site* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Tabel 4.1 menunjukkan proses seleksi sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4. 1
Tahap Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019.	660
Perusahaan yang tidak termasuk manufaktur.	(542)
Perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangan dan tidak disajikan dengan mata uang rupiah tahun 2019-2021.	(10)
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tahun 2019-2021.	43
Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan tidak diaudit pada tahun 2019-2021.	0
Jumlah Perusahaan yang masuk kriteria sampel penelitian.	65
Tahun Penelitian	3
Jumlah Sampel Penelitian	195
Data Outlier	72
Data sampel yang diolah	123

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021 adalah 660 perusahaan. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan secara lengkap ataupun tidak diaudit adalah nol dan jumlah perusahaan pada tahun 2019-2021 yang mengalami kerugian berjumlah 43 perusahaan. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan maka jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 65 perusahaan dengan tahun penelitian di tahun 2019-2021. Sedangkan data yang outlier adalah 72 sehingga diperoleh data sampel yang akan diolah sebanyak 123 data. Adapun daftar nama-nama perusahaan manufaktur tersaftar di BEI tahun 2019-2021 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4. 2

Daftar Nama Perusahaan

1	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
2	AKPI	PT Argha Karya Prima Ind. Tbk
3	ALDO	PT Alkindo Naratama Tbk
4	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
5	ASII	PT Astra International Tbk
6	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
7	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk
8	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
9	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
10	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
11	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
12	DMND	PT Diamond Food Indonesia Tbk
13	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
14	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
15	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
16	EKAD	PT Ekadharma International Tbk

17	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
18	GJTL	PT Gajah Tunggal Tbk
19	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
20	HMSP	PT HM SAMPOERNA Tbk
21	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
22	HRTA	PT Hartadinata Abadi Tbk
23	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
24	IFII	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
25	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk
26	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk
27	INAI	PT Indal Aluminium Industry Tbk
28	INCI	PT Intanwijaya Internasional Tbk
29	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
30	INDS	PT Indospring Tbk
31	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
32	ISS	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
33	JPFA	PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk
34	KAEF	PT Kimia Farma Tbk
35	KDSI	PT Kedawung Setia Industrial Tbk
36	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
37	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
38	KMTR	PT Kirana Megatara Tbk
39	LTLS	PT Lautan Luas Tbk
40	MERK	PT Merck Tbk
41	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
42	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk
43	MOLI	PT Madusari Murni Indah Tbk
44	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
45	PBID	PT Panca Budi Idaman Tbk
46	PEHA	PT Phapros Tbk
47	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
48	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
49	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
50	SCPI	PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk
51	SIDO	PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
52	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
53	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
54	SMKL	PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk
55	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
56	SPMA	PT Suparma Tbk
57	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
58.	STAR	PT Buana Artha Anugerah Tbk

59	STTP	PT Siantar Top Tbk
60	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
61	MDKI	PT Emdeki Utama Tbk
62	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
63	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
64	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
65	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Sumber: data sekunder yang diolah

4.2 Teknik Analisis

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini untuk menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian (Prawirodiharjo et al., 2020). Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisa hasil pengumpulan data berupa jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan nilai standar deviasi. Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. 3

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FINANCIAL CONSTRAINT	123	-1,556100	-1,218600	-1,35129837	,079340779
MANAJEMEN LABA	123	-,014120	,016050	,00111650	,005609241
KOMPENSASI DIREKSI	123	,000000	,299560	,07693407	,073618437
KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	123	,000000	,396350	,03519138	,075678508
PENGHINDARAN PAJAK	123	,133920	,355010	,24201341	,042737955
Valid N (listwise)	123				

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian diperoleh 123 data yang diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2021. Nilai minimum dari variabel *financial constraint* senilai -1,556100 dengan nilai maksimum senilai -1,218600. Nilai rata-rata dari variabel *financial constraint* tahun 2019-2021 senilai -1,35129837 dan nilai standar deviasinya adalah 0,079340779. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata rata lebih kecil dari standar deviasi dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan tinggi yang artinya sebaran data *financial constraint* tidak merata. Semakin tinggi indeks WW yang dimiliki perusahaan semakin tinggi perusahaan tersebut mengalami *financial constraint*. Suatu perusahaan mengalami *financial constraint* jika skor nilainya kurang dari 1, sebaliknya perusahaan berada dalam zona aman jika skor nilainya lebih dari 1. Berdasarkan pengujian analisis statistik deskriptif rata-rata nilai indeks WW nya adalah -1,35129837.

Variabel manajemen laba nilai terendahnya adalah -0,014120 dan nilai tertingginya 0,016050. Nilai rata-rata sebesar 0,00111650 lebih kecil dari nilai standar deviasi yakni sebesar 0,005609241. Hal tersebut menunjukkan terdapat penyimpangan tinggi maka sebaran data manajemen laba dapat disimpulkan tidak merata. Dari hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini rata-rata nilai *discretionary accruals* bernilai positif lebih dari 0 maka artinya dalam penelitian ini banyak perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan manajemen laba dengan meningkatkan laba.

Hasil dari analisis ini untuk variabel kompensasi direksi nilai minimumnya adalah 0,000000 dan nilai tertingginya adalah 0,299560. Sedangkan nilai rata-rata

dari variabel ini adalah 0,07693407 lebih besar dari nilai standar deviasi senilai 0,073618437. Dari hasil ini terdapat penyimpangan rendah maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel kompensasi direksi sebaran datanya merata.

Berdasarkan statistik deskriptif variabel kepemilikan saham direksi memiliki nilai terendah senilai 0,000000 dan nilai tertinggi 0,396350. Untuk nilai rata-rata variabel ini adalah 0,03519138 lebih kecil dibandingkan nilai standar deviasi yaitu 0,075678508. Dari data ini dapat disimpulkan terdapat penyimpangan tinggi yang artinya sebaran data variabel kepemilikan saham direksi tidak merata.

Variabel penghindaran pajak nilai minimumnya adalah 0,133920 dan nilai maksimumnya adalah 0,355010. Nilai rata-rata variabel penghindaran pajak 0,24201341 lebih besar dari nilai standar deviasi yakni senilai 0,042737955. Hal tersebut menunjukkan terdapat penyimpangan rendah dapat disimpulkan bahwa sebaran data untuk variabel penghindaran pajak merata. Semakin tinggi nilai ETR mendekati nilai tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25% mengindikasikan semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak apabila *Effective Tax Rate* (ETR) kurang dari 25% dan apabila ETR lebih dari 25% di indikasikan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan analisis statistik deskriptif rata-rata nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan yang diteliti adalah senilai 24,34%.

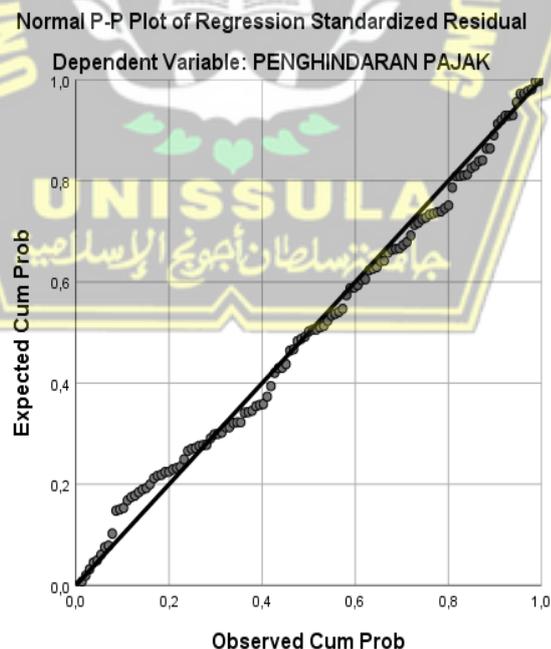
4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik

yang dilakukan diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal. Terdapat normalitas apabila residual terdistribusi secara normal dan independen. Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan grafik normal plot dan uji statistik non parametik *Kormogorov-Smirnov* (K-S) untuk menentukan data terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Gambar 4.1 dibawah ini merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji grafik normal plot:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas (Uji Grafik Normal Plot)

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan hasil dari gambar 4.1 model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji grafik normal plot menunjukkan data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dalam penelitian ini juga dilakukan uji normalitas dengan uji non-parametric *Komogorov-Smirnov*, pengambilan keputusan uji ini adalah berdasarkan nilai signifikasinya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari α (0,05) maka data telah terdistribusi dengan normal begitupula sebaliknya jika nilai probabilitas α (0,05) lebih kecil maka variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berikut adalah tabel 4.4 yang menunjukkan hasil uji *Komogorov Smirnov* dalam penelitian ini.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Normalitas (Uji Kormogorov-Smirnov)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		123
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03795228
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,050
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Hasil uji *Komogorov-Smirnov* (K-S) berdasarkan tabel diatas menunjukkan data berdistribusi normal, hal ini ditunjukkan oleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed)

sebesar 0,200 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga data dalam model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah model regresi yang diuji terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antar variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas nilai *tolerance* adalah 0,1 dan sedangkan batas nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah 10. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai *tolerance* $>$ 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) $<$ 10. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4. 5

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	FINANCIAL CONSTRAINT	,854	1,171
	MANAJEMEN LABA	,997	1,003
	KOMPENSASI DIREKSI	,864	1,158
	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	,939	1,065
a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK			

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar 0,1 yaitu

variabel *financial constraint* (0,854), manajemen laba (0,997), kompensasi direksi (0,864) dan kepemilikan saham direksi (0,939). Nilai *Variance Inflation Factor* VIF semua variabel independen kurang dari 10 yakni variabel *financial constraint* (1,171), manajemen laba (1,003), kompensasi direksi (1,158) dan kepemilikan saham direksi (1,065). Dari hasil diatas tersebut tidak ada korelasi antar variabel independen sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi dalam penelitian ini terbebas dari multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model regresi linear bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat autokorelasi, uji autokorelasi dapat diukur dengan nilai Durbin Watson untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan DW-test. Dalam pengujian DW-test ini dilakukan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- b. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi
- c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4. 6

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,460 ^a	,211	,185	,038590179	1,540

a. Predictors: (Constant), KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, MANAJEMEN LABA, KOMPENSASI DIREKSI, FINANCIAL CONSTRAINT

b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa diperoleh nilai DW sebesar 1,540. Hasil nilai durbin watson sebesar 1,540 tersebut berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari adanya autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Suatu model regresi akan dinyatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan *uji glejser* dan *scatterplot*. Jika hasil uji diatas level signifikan ($r > 0,05$) artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya jika levelnya dibawah signifikan ($r < 0,05$) artinya terjadi heteroskedastisitas. Untuk pengujian dengan *scatterplot* dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID), apabila titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut merupakan hasil dari *uji glejser* tabel 4.7

Tabel 4. 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

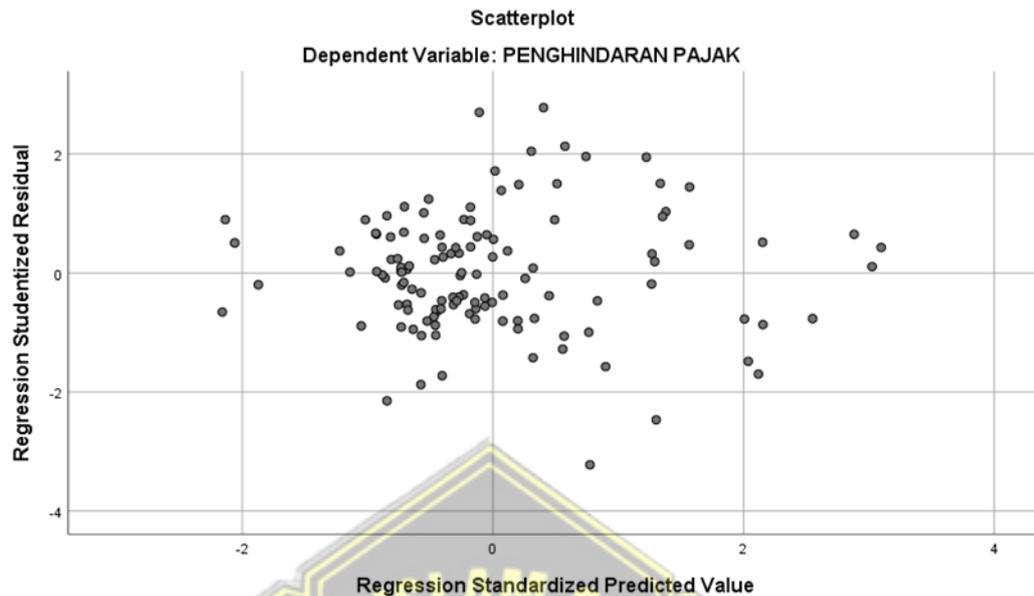
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	,176	,172	,310
	FINANCIAL CONSTRAINT	,048	,124	,701
	MANAJEMEN LABA	-1,540	1,625	,345
	KOMPENSASI DIREKSI	,230	,133	,087
	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	-,140	,124	,262

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Hasil dari *uji glejser* diatas diperoleh nilai signifikan pada variabel *financial constraint* (0,710), manajemen laba (0,345), kompensasi direksi (0,087), kepemilikan saham direksi (0,262) dimana nilai dari masing-masing keempat variabel tersebut lebih dari nilai signifikansi 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Selain *uji glejser* berikut gambar 4.2 merupakan grafik *scatterplot* dalam pengujian heteroskedastisitas.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu X dan Y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen yaitu : *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi, dan kepemilikan saham direksi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	,254	,066	3,843	,000
	FINANCIAL CONSTRAINT	,021	,048	,433	,666
	MANAJEMEN LABA	,882	,624	1,413	,160
	KOMPENSASI DIREKSI	,243	,051	4,762	,000
	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	-,114	,048	-2,396	,018

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Dari tabel 4.8 diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,254 + 0,021X_1 + 0,882X_2 + 0,243X_3 + (-0,114)X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. α = konstanta sebesar 0,254 dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 bernilai positif, artinya apabila keempat variabel independen yaitu *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi, kepemilikan saham direksi dianggap konstanta (bernilai 0), maka nilai dari variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,254 satuan.
2. Koefisien regresi variabel *financial constraint* sebesar 0,021 dengan nilai sig 0,666 lebih besar dari 0,05 bernilai positif sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila variabel *financial constraint* meningkat sebesar satu (satuan) dan variabel lainnya dianggap konstanta, maka variabel penghindaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,021.
3. Manajemen laba menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,882 dengan nilai sig 0,160 lebih besar dari 0,05 bernilai positif, maka manajemen laba tidak

berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila variabel manajemen laba terjadi peningkatan satu (satuan) dan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel penghindaran pajak akan terjadi peningkatan sebesar 0,882.

4. Kompensasi Direksi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,243 dengan nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang bernilai positif sehingga kompensasi direksi mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin besar kompensasi direksi maka akan meningkatkan penghindaran pajak. Apabila variabel kompensasi direksi mengalami peningkatan satu (satuan) dan variabel yang lain dianggap konstan maka variabel penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,243.
5. Kepemilikan Saham Direksi menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,114 dengan nilai sig 0,018 lebih kecil dari 0,05 yang bernilai negatif sehingga kepemilikan saham direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin besar kepemilikan saham direksi maka tingkat penghindaran pajaknya akan semakin kecil. Jika variabel kepemilikan saham direksi mengalami kenaikan sebesar satu (satuan), sedangkan variabel yang lain dianggap konstan maka variabel penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,114.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Uji pengaruh parsial atau uji t dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel

dependen. Jika nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian pengaruh parsial menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil seperti berikut:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

HIPOTESIS	Sig.	B	t tabel	t hitung	Hasil	Keterangan
<i>Financial Constraint</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	0,666	0,021	1,98027	0,433	Tidak Berpengaruh	Ditolak
Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	0,160	0,882	1,98027	1,413	Tidak Berpengaruh	Ditolak
Kompensasi Direksi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	0,000	0,243	1,98027	4,762	Berpengaruh Positif	Ditolak
Kepemilikan Saham Direksi berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	0,018	-0,114	1,98027	-2,396	Berpengaruh Negatif	Diterima

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil uji t diatas nilai signifikansi variabel *financial constraint* dan manajemen laba sebesar 0,666 dan 0,160 atau lebih besar dari 0,05 sehingga variabel *financial constraint* dan manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 dan

0,018 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih kecil sehingga variabel kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (*goodness of fit*) atau R^2 dalam penelitian ini dilakukan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel adalah hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Koefisien Detreminasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,460 ^a	,211	,185	,038590179

a. Predictors: (Constant), KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, MANAJEMEN LABA, KOMPENSASI DIREKSI, FINANCIAL CONSTRAINT

b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai *adjusted R Square* adalah 0,185 atau 18,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh variabel independen atau pengaruh variabel *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi terhadap variabel penghindaran pajak adalah sebesar 18,5% sisanya 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji F (Uji Pengaruh Simultan)

Dalam penelitian ini uji pengaruh simultan atau uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas (independen) memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (dependen). F-statistik digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai probabilitas signifikasinya kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,047	4	,012	7,909	,000 ^b
	Residual	,176	118	,001		
	Total	,223	122			

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI, MANAJEMEN LABA, KOMPENSASI DIREKSI, FINANCIAL CONSTRAINT

Sumber: diperoleh dari SPSS ver 26.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga variabel *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya model regresi dalam penelitian ini dapat diterima untuk memprediksi variabel independen.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Financial Constraint terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil dari uji t maka diperoleh nilai signifikansi pada *financial constraint* senilai 0,666 artinya variabel *financial constraint* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu *Financial Constraints* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* (H_1), ditolak. Hasil penelitian ini kemungkinan ditimbulkan karena periode penelitian yang dilakukan dimasa Pandemi *Covid-19* tahun 2019-2021. Sebagaimana diketahui, disebabkan karena adanya Pandemi *Covid-19* yang memicu timbulnya kerugian di banyak perusahaan, pemerintah banyak mengeluarkan regulasi untuk meringankan beban pajak bagi perusahaan yang terdampak pandemi *Covid-19*. Insentif pajak tersebut diantaranya pemberian insentif perpajakan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang kemudian karena berbagai masukan disempurnakan dengan peraturan Nomor 86/PMK.03/2020.

Pemerintah kemudian juga mengeluarkan regulasi baru yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu pada awal tahun 2021, dimana diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dengan adanya beberapa regulasi pemerintah ini dimasa pandemi *Covid-19* beban pajak perusahaan dapat berkurang atas insentif ataupun keringanan yang telah diberikan pemerintah pada Wajib Pajak Badan,

sehingga tindakan meminimalkan ataupun menghindari beban pajak dimasa pajak dimasa pandemi *Covid-19* bukan merupakan opsi utama bagi perusahaan di Indonesia

Hasil tidak signifikan pada hipotesis yang menyatakan bahwa *financial constraint* berpengaruh terhadap penghindaran pajak kemungkinan juga disebabkan karena keseluruhan sampel pada penelitian ini mengalami kondisi *financial constraint* sebagai akibat dari adanya pandemi *Covid-19* dikurun waktu tahun 2019-2021. Hal ini sebagaimana ditunjukkan pada hasil uji statistik deskriptif yang menyatakan nilai variabel *financial constraint* adalah sebesar -1,556100 sampai dengan -1,218600. Sebagaimana dinyatakan dalam (Saputra et al., 2017) disebutkan bahwa jika nilai skor *financial constraint* diangka kurang dari 1, maka perusahaan tersebut mengalami *financial constraint* dan apabila nilai skor *financial constraint* lebih dari 1 perusahaan berada pada zona aman. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian (Alifianti H. P. & Chariri, 2017; Chen & Lai, 2012; Utami & Irawan, 2022) yang menyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun sejalan dengan hasil penelitian dari (Rahmana, 2022).

4.5.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil uji t pada tabel 4.8 didapat nilai signifikansi pada manajemen laba sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05 dan nilai t tabel senilai 1,98027 lebih besar dari t hitung senilai 1,143. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, jadi hipotesis yang diajukan yaitu manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (H_2) ditolak. Berdasarkan hasil ini mengindikasikan bahwa keputusan dilakukannya

manajemen laba oleh pihak manajemen atau besar kecilnya manajemen laba suatu perusahaan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengukuran manajemen laba yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* yang mana jika nilai $DA < 0$ maka perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dengan menurunkan laba (*income decreasing*) dan sebaliknya jika nilai $DA > 0$ maka perusahaan melakukan tindakan manajemen laba dengan menaikkan pendapatan (*income increasing accrual*). Pandemi *Covid 19* membuat banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang berujung pada berkurangnya laba yang diperoleh. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini, nilai rata-rata dari *discretionary accruals* (DA) sebesar 0,001201 artinya kebanyakan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini melakukan tindakan manajemen laba berupa peningkatan laba akrual (*income increasing accrual*). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan, karena tindakan manajemen laba dilakukan untuk mempertahankan kinerja perusahaan agar terlihat baik-baik saja pada masa pandemi *covid-19* bukan untuk tujuan penghindaran pajak karena pada masa pandemi banyak kebijakan stimulus pajak yang dikeluarkan pemerintah untuk meringankan beban pajak perusahaan. Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian sebelumnya oleh (Husin et al., 2020) dan (Prawirodiharjo et al., 2020) yang mengemukakan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.5.3 Pengaruh Kompensasi Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian parsial pada variabel kompensasi direksi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya kompensasi direksi secara signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil dari pengujian analisis linear berganda diperoleh nilai koefisien sebesar 0,243 bernilai positif. Nilai t tabel lebih kecil dari t hitung yaitu $1,98027 < 4,762$ dapat disimpulkan kompensasi direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, jadi hipotesis Kompensasi Direksi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* (H_3), ditolak.

Pemberian kompensasi terhadap pihak direksi dapat memacu kinerja dalam meminimalkan beban pajak perusahaan agar lebih efektif. Kinerja para dewan direksi akan meningkat bila didukung oleh apresiasi perusahaan berupa rasa simpatik perusahaan dalam bentuk kompensasi yang membuat giat dalam bekerja demi kelangsungan perusahaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi dapat memacu kinerja para dewan direksi untuk meminimalkan beban pajak yang akan disetorkan. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Putri & Indriani, 2020) jika semakin besar kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada para dewan direksi maka akan semakin besar pula tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan.

4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Saham Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t variabel kepemilikan saham direksi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 artinya kepemilikan saham direksi berpengaruh secara signifikan

terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis linear berganda 0,114 bernilai negatif. Nilai t tabel lebih kecil dari t hitung yaitu $1,98027 < -2,396$ dapat disimpulkan kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Husin et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* namun selaras dengan hasil penelitian (Putri & Indriani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi akan membuat tindakan *tax avoidance* semakin rendah. Kepemilikan saham direksi akan mendorong manajemen berusaha untuk mempertimbangkan setiap keputusan yang akan diambil salah satunya tindakan *tax avoidance* dalam upaya meminimalisir beban pajak yang akan disetor. Sehingga para dewan direksi akan lebih berhati-hati agar perusahaannya dalam kondisi aman dimasa mendatang. Dengan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimalisir pajak maka kemungkinan resiko yang terjadi dimasa mendatang akan muncul misalnya pembayaran denda dan bunga bahkan pemeriksaan usahanya terkait dengan permasalahan perpajakan, sehingga dalam memutuskan kebijakan perpajakan para dewan direksi tidak akan mendukung tindakan *tax avoidance* sebagai upaya dalam meminimalisir beban pajak perusahaan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dalam penelitian ini mengenai faktor determinan penghindaran pajak di masa pandemi *covid-19* dalam hal ini penghindaran pajak sebagai variabel dependen dengan variabel independennya terdiri dari *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode tahun 2019-2021 maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. *Financial Constraint* berdasarkan dalam hasil penelitian ini diperoleh nilai sig sebesar 0,666 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kondisi kendala keuangan yang dihadapi perusahaan Indonesia pada masa pandemi *Covid-19* dibantu oleh sistem regulasi pemerintah yakni pemberian insentif pajak kepada wajib pajak badan sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah ini yang mengurangi beban pajak saat perusahaan mengalami *financial constraint* dan membuat para perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak karena terbantu dengan kebijakan pemerintah.
2. Manajemen laba dalam penelitian ini mempunyai nilai sig sebesar 0,160 lebih besar dari 0,05 sehingga manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena kemungkinan perusahaan melakukan tindakan manajemen laba bukan karena motif penghindaran pajak melainkan untuk

motif lain agar laporan kinerja perusahaan terlihat baik pada masa pandemi *Covid-19* ini.

3. Kompensasi direksi mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar jumlah kompensasi yang diberikan perusahaan semakin besar pula tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.
4. Kepemilikan saham direksi mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan saham direksi akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

5.2 Keterbatasan

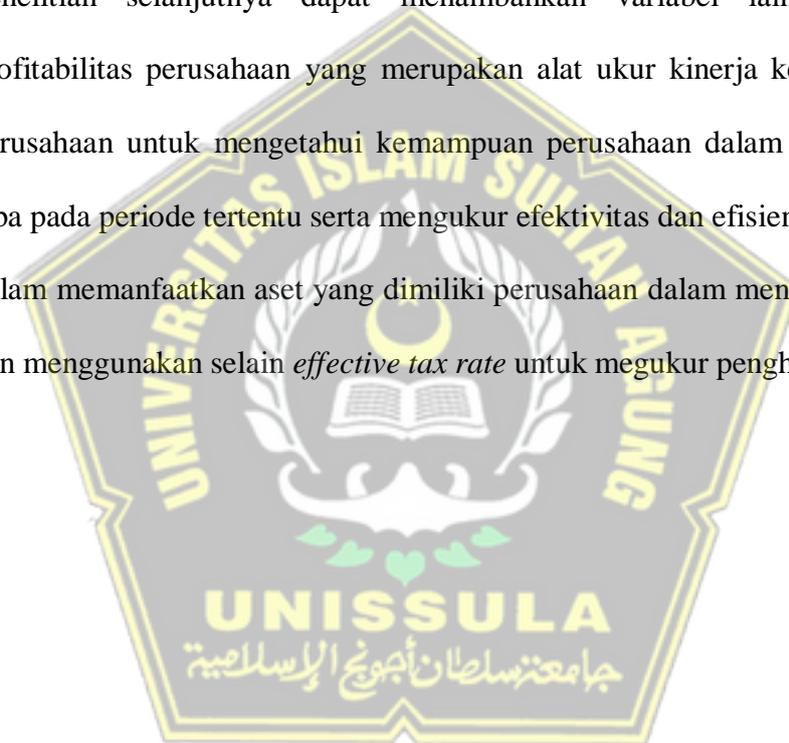
Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang menjadikan penelitian ini belum maksimal, yaitu sebagai berikut:

1. Disebabkan karena periode penelitian ini dilakukan dalam kondisi Pandemi *Covid-19* (tahun 2019 – 2021) hal ini menimbulkan hasil penelitian yang bias. Efek pandemi menyebabkan keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini mengalami *financial constraint* yang mendorong dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Kondisi luar biasa seperti ini bisa saja mempengaruhi perilaku penghindaran pajak yang berbeda dari kondisi normal.
2. Dari hasil penelitian ini, variabel *financial constraint*, manajemen laba, kompensasi direksi dan kepemilikan saham direksi hanya berpengaruh sebesar 18,5% sehingga 81,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

5.3 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil yang lebih baik lagi dengan adanya beberapa masukan sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti tahun setelah masa pandemi Covid-19 berakhir untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain diantaranya profitabilitas perusahaan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu serta mengukur efektivitas dan efisiensi operasional dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba dan menggunakan selain *effective tax rate* untuk mengukur penghindaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Alifianti H. P., R., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
- Benjamin, S. J. (2019). The Effect of Financial Constraints on Audit Fees. *capital markets Review*, 27(69), 43–82.
- Chen, C., & Lai, S. (2012). Financial Constraint and Tax Aggressiveness. *Working paper, University of Auckland*, 1–41.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L., & Thornock, J. R. (2017). Changes in corporate effective tax rates over the past 25 years. *Journal of Financial Economics*, 124(3), 441–463. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.04.001>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Hanifah Hanim dan Fatahurrazak. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dan Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1(2), 27–50. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i2.1243>
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (ed.); I, Nomor March). CV. Pustaka Ilmu.
- Hariseno, P. E., & Pujiono. (2021). Pengaruh Praktik Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 110–111.
- Husin, N., Agustina, R., Atichasari, A. S., & Pratiwi, C. M. (2020). Peran Manajemen Laba, Kompensasi Direksi, dan Kepemilikan Saham Direksi Terhadap Agresivitas Pajak pada Industri Manufaktur di Indonesia. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 181–192. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.181-192>
- Kusuma, C. A., & Firmansyah, A. (2018). Manajemen Laba, Corporate Governance, Kualitas Auditor Eksternal Dan Agresivitas Pajak. *TEKUN:*

Jurnal Telaah Akuntansi dan Bisnis, 9(1), 108–123.
<https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2601>

- Manossoh, H. (2016). **Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan**. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). ANDI Yogyakarta.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Pratama, B. C. (2020). *Corporate Governance* (S. W. Azmi Fitriati (ed.)). UM Purwokerto Press.
- Pratiwi, D. W., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Jumlah Dewan Direksi Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(1), 1–9.
- Prawirodiharjo, M. S., Suryani, E., & Kurnia. (2020). Pengaruh manajemen laba, profitabilitas dan leverage terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-2018). *e-Proceeding of Management*, 7(1), 846–854.
- Putri, R. O. W., & Indriani, E. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Eksekutif, Kompensasi Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 7(1), 64–75. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/659/599>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Edisi Revi). Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahmana, D. (2022). Apakah Financial Distress Memengaruhi Penghindaran Pajak? Studi Kasus Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Scientax*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.52869/st.v4i1.257>
- Saputra, M., Nadirsyah, & Hanifah, H. (2017). The influence of ownership structures, financial distress, and tax loss carry forward on tax avoidance (study on manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange). *Journal of Resources Development and Management*, 31(2011), pp.21-31. www.iiste.org
- Silvera, D. L., Hizazi, A., Syurya Hidayat, M., & Rahayu, S. (2022). Financial constraints and corporate governance as moderating variables for the determinants of tax avoidance. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(1), 274–286. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(1\).2022.21](https://doi.org/10.21511/imfi.19(1).2022.21)
- Simanullang, A. N., & Parasetya, M. T. (2022). Pengaruh Cash Holding, Financial Constraint, Dan Investment Opportunities Terhadap Audit Fee (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016- 2019).

Diponegoro Journal Of Accounting, 10, 1–11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33056>

Siti Mujanah, M. P. . (2019). *Manajemen Kompensasi*. CV. Putra Media Nusantara (PMN).

Sochib. (2016). *Good Corporate Governance Manajemen laba dan Kinerja Keuangan*.

Sugiyono, P. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.

Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.

Syahza, A., & Riau, U. (2021). *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021* (Nomor September). UR Press.

Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>

